

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktural sosial, sikap-sikap masyarakat institusi nasional disamping terus mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentas kemiskinan atau perubahan total suatu masyarakat dalam penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan menuju lebih baik. Sedangkan pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses kerja antara pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam suatu wilayah.

Pertumbuhan ekonomi secara sempit dapat di artikan dengan meningkatnya produksi total suatu daerah. Selain itu pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan pendapatan perkapita serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tidak akan pernah lepas dari peranan para pelaku ekonomi yakni pemerintah yang berperan sebagai instrumen kebijakan publik dan fiskal, swasta yang berperan dalam pengembangan investasi dan masyarakat itu sendiri yang berperan sebagai input dari faktor produksi dan jaminan terciptanya pasar dalam perekonomian. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk melihat adanya gejala pertumbuhan ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Karena didalamnya mencerminkan kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dan dicapai oleh penduduk selama periode tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran dan kesejahteraan suatu daerah atau masyarakat. Untuk mengukur

pertumbuhan ekonomi, nilai PDRB yang digunakan adalah PDRB berdasarkan harga konstan (PDRB riil) sehingga angka pertumbuhan yang dihasilkan merupakan pertumbuhan riil yang terjadi karena adanya tambahan produksi. Adanya keseimbangan dalam suatu perekonomian merupakan salah satu target dalam rangka peningkatan perekonomian suatu daerah. Hal tersebut dapat dicapai melalui keterlibatan variabel ekonomi yang mempengaruhi keseimbangan tersebut. Untuk melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 6 Kota di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 6 Kota di Provinsi Sumatera Utara Atas Dasar Harga Konstan (Milyar Rupiah) Tahun 2011-2015

Tahun	Medan	Binjai	Pematangsiantar	Tanjung Balai	Tebing Tinggi	Sibolga
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
2011	38.576,23	2.147,82	2.161,59	1.468,33	1.243,37	777,48
2012	105.162,00	5.553,63	6.753,56	3.919,55	2.758,87	2.458,50
2013	110.795,42	5.890,97	7.141,86	4.152,39	2.924,75	2.605,01
2014	117.528,08	6.237,29	7.594,53	4.392,58	3.084,05	2.758,57
2015	124.277,48	6.571,20	7.992,32	4.637,50	3.234,05	2.914,51

Sumber:

- 1) BPS Provinsi Sumatera Utara, *Pendapatan Regional Provinsi Sumatera Utara Kab/Kota, 2011-2012* Hal. 154
- 2) BPS Provinsi Sumatera Utara, *Sumatera dalam Angka, 2013-2015, Hal. 427*

Dari data di atas dapat dilihat bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 6 kota di Provinsi Sumatera Utarayaitu Kota Medan, Binjai, Pematangsiantar, Tanjung Balai, Tebing Tinggi dan Sibolga bahwa pada tahun 2011-2015 PDRB 6 Kota di Provinsi Sumatera Utarayang tertinggi adalah Kota Medan, diikuti kota-kota lainnya yaitu Pematangsiantar dan Binjai merupakan kota kedua tertinggi, kemudian diikuti dengan Tanjung Balai dan Tebing Tinggi PDRB ketiga tertinggi, akan tetapi Sibolga memiliki PDRB yang paling rendah di Sumatera Utara.

Berdasarkan data tersebut, diperoleh gambaran bahwa secara umum pembentuk PDRB Provinsi Sumatera Utara atas harga konstan berturut-turut yang tertinggi adalah Kota medan. Hal

itu terlihat secara nyata dengan semakin banyaknya layanan sektor jasa dan perdagangan yang bermunculan di Kota Medan, sehingga banyak ditemukan Ruko di berbagai sudut kota. Derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat Kota Medan, semakin baik dan terus meningkat, dengan tingkat pendapatan masyarakat yang cenderung juga terus meningkat.

Salah satu sumber pembiayaan untuk pembangunan daerahnya yang pada akhirnya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yaitu dengan adanya sumber-sumber penerimaan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Pengelolaan keuangan daerah di Indonesia dapat di telusuri dari skema keuangan pemerintah daerah yang tertuang secara resmi dalam Undang-undang nomor 25 tahun 1999 dan di lengkapi dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000. Kini, peraturan tersebut telah disempurnakan sehingga penerimaan pemerintah daerah dapat disimak dalam UU Nomor 32 dan 33 tahun 2004. Di sebutkan dalam peraturan tersebut bahwa sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 6 Kota di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 6 Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2015 (000 Rupiah)

Tahun	Medan	Binjai	Pematangsiantar	Tanjung Balai	Tebing Tinggi	Sibolga
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
2011	995.072.572	26.470.166	44.792.749	27.238.537	33.665.264	21.663.390
2012	1.147.901.461	48.178.079	49.915.366	27.676.094	47.330.984	26.698.353
2013	1.206.196.709	49.172.644	61.357.963	31.920.754	53.199.538	29.457.629
2014	1.515.685.947	71.967.138	90.477.498	34.297.306	74.515.273	52.922.967
2015	1.645.027.386	78.327.793	95.557.865	48.388.428	82.410.053	60.486.780

Sumber:

- 1) BPS Provinsi Sumatera Utara, Statistik Keuangan Daerah Sumatera Utara, Kota Medan, 2011-2012, Hal. 37
- 2) BPS Provinsi Sumatera Utara, Statistik Keuangan Daerah Sumatera Utara, Kota Binjai, 2011-2015 Hal. 38
- 3) BPS Provinsi Sumatera Utara, Statistik Keuangan Daerah Sumatera Utara, Kota Pematang Siantar 2011-2015 Hal. 35
- 4) BPS Provinsi Sumatera Utara, Statistik Keuangan Daerah Sumatera Utara, Kota Tanjung Balai 2011-2015 Hal. 34
- 5) BPS Provinsi Sumatera Utara, Statistik Keuangan Daerah Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi 2011-2015 Hal. 36
- 5) BPS Provinsi Sumatera Utara, Statistik Keuangan Daerah Sumatera Utara, Kota Sibolga 2011-2015 Hal. 33

Berdasarkan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) di atas terlihat bahwa pada 6 kota di Provinsi Sumatera Utara yaitu Medan, Binjai Pematangsiantar, Tanjung Balai, Tebing Tinggi dan Sibolga pada tahun 2011-2015 mengalami peningkatan setiap tahun walaupun peningkatannya sangat minim. Kecuali Kota Medan pada tahun 2015 mengalami penurunan, ini menunjukkan bahwa kontribusi PAD Kota Medan rendah pada saat itu. Namun masih memiliki PAD tertinggi diantara kota-kota lainnya, Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terendah 6 Kota di Provinsi Sumatera Utara yaitu Sibolga.

Selanjutnya faktor Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (dengan kebijakan Bagi hasil pajak minimal 26% dari penerimaan dalam Negeri yang ditetapkan dalam APBN).

Untuk melihat Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak 6 Kota di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel3. Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 6 Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2015 (000 Rupiah)

Kota	Tahun	Bagi Hasil Pajak	Bagi Hasil Bukan Pajak
Medan	2011	273.698.669	794.913
	2012	195.909.903	1.188.276
	2013	172.440.053	1.614.584
	2014	213.008.107	1.326.506
	2015	121.401.841	2.171.260
Binjai	2011	39.788.888	1.543.199
	2012	40.093.352	1.241.300
	2013	32.414.156	1.185.288
	2014	25.037.451	3.057.657
	2015	19.563.488	2.154.470
Pematangsiantar	2011	24.311.681	1.977.786
	2012	35.618.371	828.181
	2013	25.457.762	768.084
	2014	25.752.059	1.684.742
	2015	22.052.599	2.832.549

Tanjung Balai	2011	16.001.774	615.513
	2012	17.862.045	972.224
	2013	19.767.851	894.585
	2014	11.669.020	973.944
	2015	12.535.090	981.413
Tebing Tinggi	2011	10.742.820	925.526
	2012	24.069.323	828.181
	2013	21.835.266	768.085
	2014	13.912.581	1.684,74
	2015	12.216.465	1.679.015
Sibolga	2011	19.211.472	574.848
	2012	20.443.255	828.181
	2013	19.546.714	768.084
	2014	14.846.990	1.684.742
	2015	12.597.290	1.679.020

Sumber:

- 1) BPS Provinsi Sumatera Utara, Statistik Keuangan Daerah Sumatera Utara, Kota Medan 2011-2015 Hal. 37
- 2) BPS Provinsi Sumatera Utara, Statistik Keuangan Daerah Sumatera Utara Kota Binjai 2011-2015 Hal.38
- 3) BPS Provinsi Sumatera Utara, Statistik Keuangan Daerah Sumatera Utara Kota Pematang Siantar 2011-2015 Hal. 35
- 4) BPS Provinsi Sumatera Utara, Statistik Keuangan Daerah Sumatera Utara Kota Tanjung Balai 2011-2015 Hal. 34
- 5) BPS Provinsi Sumatera Utara, Statistik Keuangan Daerah Sumatera Utara Kota Tebing Tinggi 2011-2015 Hal. 36
- 6) BPS Provinsi Sumatera Utara, Statistik Keuangan Daerah Sumatera Utara Kota Sibolga 2011-2015 Hal. 33

Dari tabel 3 menunjukkan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak yang diterima setiap daerah 6 Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2011-2015 berbeda. Pengoptimalan perolehan Dana Bagi Hasil yang dianggap sebagai modal bagi kepentingan pembangunan daerah akan mempercepat pertumbuhan PDRB. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak bersumber dari pedapatan APBN yang dibagihasilkan kepada daerah tertentu. Meskipun Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak bukan yang utama dalam proses mempercepat pertumbuhan tetapi berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan yang ada di Sumatera Urata melalui penerimaan dan pengolahan yang baik dan efisien.

Dengan perimbangan, khususnya dari Dana Alokasi Umum (DAU) akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab daerah masing-masing. Perubahan

berbagai kebijakan nasional sebagaimana dimaksud membawa harapan besar bagi Keadaan DAU di 6 Kota Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4. Dana Alokasi Umum (DAU) 6 Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2015 (000 Rupiah)

Tahun	Medan	Binjai	Pematangsiantar	Tanjung Balai	Tebing Tinggi	Sibolga
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
2011	1.066.353.555	336.779.454	352.525.649	275.525.468	261.948.729	248.405.548
2012	1.153.789.320	416.965.216	429.632.177	313.729.707	307.635.669	292.873.107
2013	1.270.244.794	477.553.537	492.115.399	369.246.573	368.586.756	338.507.471
2014	1.393.504.580	526.069.678	519.435.661	387.259.055	385.030.433	371.812.825
2015	1.232.071.365	541.895.577	536.792.310	398.500.353	400.236.724	380.075.080

Sumber:

- 1) BPS Provinsi Sumatera Utara, Statistik Keuangan Daerah Sumatera Utara Kota Medan 2011-2015 Hal. 37
- 2) BPS Provinsi Sumatera Utara, Statistik Keuangan Daerah Sumatera Utara ,Kota Binjai 2011-2015 Hal.38
- 3) BPS Provinsi Sumatera Utara, Statistik Keuangan Daerah Sumatera Utara, Kota Pematang Siantar 2011-2015 Hal. 35
- 4) BPS Provinsi Sumatera Utara, Statistik Keuangan Daerah Sumatera Utara Kota Tanjung Balai 2011-2015 Hal. 34
- 5) BPS Provinsi Sumatera Utara, Statistik Keuangan Daerah Sumatera Utara Kota Tebing Tinggi 2011-2015 Hal. 36
- 6) BPS Provinsi Sumatera Utara, Statistik Keuangan Daerah Sumatera Utara Kota Sibolga 2011-2015 Hal. 33

Dimana dari data 6 Kota di Provinsi Sumatera Utara diatas menunjukkan bahwa Kota Medan, Binjai, Pematangsiantar, Tanjung Balai dan Tebing Tinggi merupakan Kota yang memiliki Dana Alokasi Umum (DAU) tertinggi sedangkan Sibolga memiliki DAU terendah. Dengan adanya transfer DAU yang tinggi diharapkan dapat terjadi pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial 6 Kota di Provinsi Sumatera Utara sehingga tujuan dari pertumbuhan ekonomi dapat dicapai. Dengan pencapaian tersebut, diharapkan keseluruhan daerah dapat mengoptimalkan komponen-komponen dan kemampuan yang dimiliki sehingga pelaksanaan desentralisasi fiskal dengan menggunakan anggaran pemerintah pusat yakni dana perimbangan yang meliputi PAD dan Dana Bagi Hasil menjadi tolak ukur dalam pendanaan daerah dan menjadi motivasi bagi 6 Kota tersebut untuk menggali potensi-potensi yang dimiliki dan meningkatkan kemandirian soal pendanaan daerah.

Analisis Angkatan Kerja (*Economically Active*) dalam kaitannya dengan kondisi perekonomian merupakan hal yang menarik untuk dilakukan karena pola angkatan kerja

cenderung bergantung pada ketersediaan kesempatan kerja dan perbedaan pada tuntutan memperoleh pendapatan antar kelompok penduduk. Modal pembangunan yang penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah selain dari keuangan daerah adalah sumber daya manusia. Partisipasi aktif dari seluruh masyarakat akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut yang bisa di lihat dari Angkatan Kerja (*Bekerja/Working*) di bawah ini.

Tabel 5. Angkatan Kerja (*Bekerja/Working*) 6 Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2015 (Jiwa)

Tahun	Medan	Binjai	Pematangsiantar	Tanjung Balai	Tebing Tinggi	Sibolga
	(jiwa)	(jiwa)	(jiwa)	(jiwa)	(jiwa)	(jiwa)
2011	902.097	104.658	97.239	59.509	60.845	33.484
2012	851.642	97.179	98.300	55.457	57.809	31.419
2013	904.331	103.682	100.958	56.671	60.787	33.503
2014	882.514	111.172	91.802	62.958	65.889	35.961
2015	875.794	112.661	110.785	64.659	63.001	36.845

Sumber :

1) BPS Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Utara Dalam Angka, 2011-2012, Hal. 69

2) BPS Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Utara Dalam Angka, 2013, Hal. 70

3) BPS Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Utara Dalam Angka, 2014, Hal. 69

4) BPS Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Utara Dalam Angka, 2015, Hal. 77

Sedangkan dari data Angkatan Kerja (*Bekerja/Working*) lima tahun terakhir ini, mengalami peningkatan dan penurunan, dimana yang memiliki Angkatan Kerja yang benar-benar bekerja adalah Medan yang tertinggi dan yang kedua Binjai dan diikuti kota lainnya seperti Pematangsiantar, Tebing Tinggi dan Tanjung Balai lalu disusul Sibolga yang menjadi peringkat terendah. Dimana nilai terbesar dari penduduk yang berusia 15 tahun keatas yang termasuk angkatan kerja yang benar-benar bekerja terdapat pada penduduk yang tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada jenjang SMA.

Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah maka pemerintah berusaha secara aktif untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerahnya sendiri. Hal ini bisa dilihat dari nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah masih sangat minim di bandingkan dengan nilai Dana Bagi Hasil (Pajak dan Bukan Pajak) dan Dana Alokasi Umum (DAU), hal ini berarti penerimaan yang dibutuhkan untuk membiayai pembangunan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (PDRB riil) lebih banyak dalam bentuk sumbangan dan bantuan pemerintah pusat.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan adanya otonomi daerah di harapkan tiap-tiap daerah mampu menggali dan mengelola sumber-sumber penerimaan baik yang berasal dari pendapatan daerah yaitu melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), hal ini dimaksudkan untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang lebih baik. Sedangkan Angkatan Kerja (*Economically Active*) adalah bagian dari tenaga kerja yang diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam menambah jumlah angkatan kerja. Berbagai gambaran di atas maka Penulis ingin meneliti mengenai bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, dan Dana Alokasi Umum serta Angkatan Kerja (*Economically Active*) terhadap Produk Domestik Regional Bruto yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis memilih judul sebagai berikut: **“Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dan**

Angkatan Kerja (*Economically Active*) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 6 Kota di Provinsi Sumatera Utara”.

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka berikut pertanyaan penelitiannya :

- 1) Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 6 Kota di Provinsi Sumatera Utara ?
- 2) Bagaimana pengaruh Bagi Hasil Pajak terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 6 Kota di Provinsi Sumatera Utara ?
- 3) Bagaimana pengaruh Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 6 Kota di Provinsi Sumatera Utara ?
- 4) Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 6 Kota di Provinsi Sumatera Utara ?
- 5) Bagaimana pengaruh Angkatan Kerja (*Economically Active*) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 6 Kota di Provinsi Sumatera Utara ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 6 Kota di Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Untuk menganalisis Pengaruh Bagi Hasil Pajak terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 6 Kota di Provinsi Sumatera Utara.
- 3) Untuk menganalisis Pengaruh Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 6 Kota di Provinsi Sumatera Utara.

- 4) Untuk menganalisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 6 Kota di Provinsi Sumatera Utara.
- 5) Untuk menganalisis Pengaruh Angkatan Kerja (*Economically Active*) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 6 Kota di Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun mamfaat yang diharapkan dari penelitianini adalah:

1. Bagi Instansi Pemerintah

Sebagai bahan masukan agar pemerintah pusat khususnya pemerintahdaerah lebih memperhatikan tentang kebijakan otonomi daerah.

2. Bagi Dunia Akademis

Hasil penelitian dapat di pakai sebagai bahan referensi perpustakaan,untuk referensi perbandingan terhadap objek penelitian yang samakhususnya tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD),Bagi Hasil Pajak,Bagi Hasil bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Angkatan Kerja (*Economically Active*) terhadapProduk Domestik Regional Bruto (PDRB) 6 Kota di Provinsi Sumatera Utara.

3. Bagi Penulis

Bagaimana penulis dapat mempratekan pengetahuan yang diperoleh dalambentuk tulisan sekaligus mendapatkan pengetahuan mengenai hal yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pertubuhan Ekonomi

“Pertumbuhan Ekonomi dapat didefinisikan sebagai Perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah”.¹⁾

Selain itu “Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator lainnya bagi kemajuan ekonomi yang dicapai Indonesia. Data yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat atau laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).”²⁾

Pertumbuhan ekonomi meliputi 3 aspek yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses (aspek ekonomis) suatu perekonomian yang berkembang dan berubah dari waktu ke waktu.
2. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan adanya kenaikan output perkapita dalam hal ini 2 aspek penting yaitu output total dan jumlah penduduk. Output perkapita adalah output total di bagi jumlah penduduk.
3. Pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan perspektif waktu jangka panjang dikatakan tumbuh bila dalam jangka panjang waktu yang cukup (5 tahun) mengalami kenaikan output.

Dari berbagai definisi diatas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa suatu proses perekonomian dikatakan mengalami suatu perubahan atau pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi adalah lebih tinggi dari pada yang di capai pada waktu sebelumnya. Dengan kata lain perkembangan baru tercipta apabila jumlah fisik barang-barang dan jasa-jasa yang di hasilkan bertambah besar pada tahun berikutnya. Sedangkan untuk mengetahui apakah suatu

¹⁾ Sadono Sukirno, **Teori Pengantar Makroekonomi**, edisi ketiga, Cetakan ke-23, Jakarta: Rajawali, PT RajaGrafindo Persada, 2015, Hal,9.

²⁾ Elvis F. Purba, Juliana L. Tobing, Dame Esther Hutabarat, **Ekonomi Indonesia**, Medan: Universitas HKBP Nommensen, 2012, Hal. 27.

perekonomian mengalami pertumbuhan perlu ditentukan perubahan yang sebenarnya terjadi dalam kegiatan-kegiatan dari tahun ke tahun.

1. Proses Pertumbuhan Ekonomi

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, faktor ekonomi dan non ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di suatu Negara tergantung pada sumber alamnya, sumber daya manusia, modal, usaha, teknologi, dan sebagainya.

a. Faktor Ekonomi

Para ahli ekonomi menganggap faktor produksi sebagai kekuatan utama yang mempengaruhi pertumbuhan. Faktor-faktor produksi terdiri dari:

1) Sumber Alam

Tanah yang dapat ditanami merupakan faktor yang paling berharga selain tanah, sumber daya alam yang penting antara lain minyak gas, hutan, air, dan bahan-bahan mineral lainnya.

2) Sumber Daya Manusia

Manusia menjadi salah satu faktor penting yang harus ada dalam perekonomian, karena pada dasarnya manusia menjadi pelaksana dalam segala bentuk aktivitas perekonomian. Yang terpenting dalam pertumbuhan ekonomi adalah bukan jumlah atau kuantitas dari manusianya namun yang paling penting yakni kualitas yang dimiliki oleh masing-masing individu.

3) Akumulasi Modal

Untuk pembentukan modal diperlukan pengorbanan berupa pengurangan konsumsi yang mungkin berlangsung selama beberapa puluh tahun. Pembentukan modal dan investasi ini sebenarnya sangat dibutuhkan untuk kemajuan cepat di bidang ekonomi.

4) Organisasi

Organisasi bersifat melengkapi dan membantu meningkatkan produktivitasnya.

5) Kemajuan Teknologi

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor paling penting di dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan itu berkaitan dengan perubahan di dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil teknik penelitian terbaru.

b. Faktor Non Ekonomi

Faktor non ekonomi bersama-sama saling mempengaruhi kemajuan perekonomian. Oleh karena itu faktor non ekonomi juga memiliki arti penting di dalam pertumbuhan ekonomi. Beberapa faktor non ekonomi diantaranya:

1) Faktor Sosial

Faktor sosial dan budaya juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Faktor ini menghasilkan perubahan pandangan dan harapan, struktur dan nilai-nilai sosial.

2) Faktor Sumber Daya Manusia

Kualitas input tenaga kerja atau sumber daya manusia merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan ekonomi.

3) Faktor Politik dan Administrative

Struktur politik dan administratif yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi Negara terbelakang, administratif yang kuat, efisiensi, dan tidak korup, demikian amat penting bagi pertumbuhan ekonomi.

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi

a. Pandangan Adam Smith

Proses pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith dibedakan menjadi dua aspek diantaranya yaitu :

1) Pertumbuhan Output Total

Menurut Adam Smith sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumberdaya alam yang tersedia merupakan batas maksimum bagi pertumbuhan ekonomi. Maksudnya jika sumber daya ini belum digunakan sepenuhnya maka jumlah penduduk dan stok modal yang ada yang memegang peranan dalam pertumbuhan output. Tetapi pertumbuhan output tersebut akan berhenti jika semua sumberdaya alam tersebut digunakan secara penuh. Sumberdaya manusia (jumlah penduduk) mempunyai peranan yang sangat pasif dalam proses pertumbuhan output. Jumlah penduduk menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu masyarakat. Stok modal merupakan unsur produksi yang sangat penting untuk menentukan tingkat output.

2) Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk akan meningkat jika tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah subsisten yaitu tingkat upah yang pas-pasan untuk hidup. Tingkat upah yang berlaku menurut Adam Smith ditentukan oleh tarik-menarik antara kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Sementara itu permintaan akan tenaga kerja akan ditentukan oleh stok modal dan tingkat output masyarakat. Oleh karena itu laju pertumbuhan permintaan tenaga kerja ditentukan oleh laju pertumbuhan stok modal (akumulasi modal) dan laju pertumbuhan output.

b. Solow-Swan

Pertumbuhan ekonomi neo klasik berkembang sejak tahun 1950-an. Teori ini berkembang berdasarkan analisis-analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi klasik. Ekonom yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori tersebut adalah Robert Solow dan Trevor Swan. Pandangan teori ini didasarkan kepada anggapan yang mendasari analisis klasik yaitu perekonomian akan tetap mengalami tingkat pengerjaan penuh

(*full employment*) dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Dalam teori ini rasio modal-output (*capital-output ratio*=COR) bisa berubah. Dengan kata lain jika lebih banyak modal yang digunakan maka tenaga kerja yang dibutuhkan lebih sedikit. Sebaliknya jika modal yang digunakan lebih sedikit, maka lebih banyak tenaga kerja yang dibutuhkan. Dengan adanya fleksibilitas ini suatu perekonomian mempunyai kebebasan yang tak terbatas dalam menentukan kombinasi antara modal (K) dan tenaga kerja (L) yang akan digunakan untuk menghasilkan tingkat output tertentu.

c. Keynesian (Harrod- Domar)

Teori Harrod Domar merupakan perluasan dari analisis Keynesian mengenai kegiatan ekonomi secara nasional dan masalah tenaga kerja. Dalam teorinya pembentukan modal merupakan faktor penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal tersebut dapat diperoleh melalui akumulasi modal. Pembentukan modal tidak hanya di pandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa tetapi juga akan meningkatkan permintaan efektif masyarakat. Teori ini menunjukkan bahwa jika ada suatu periode tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada masa berikutnya perekonomian tersebut akan mempunyai kemampuan yang lebih besar dalam menghasilkan barang dan jasa. Teori ini juga menganggap bahwa kenaikan kapasitas produksi dan pendapatan nasional ditentukan oleh kenaikan pengeluaran masyarakat. Dengan demikian meskipun kapasitas produksi bertambah, pendapatan nasional baru akan mengalami kenaikan hanya jika terjadi kenaikan pengeluaran masyarakat.

3. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Data ekonomi merupakan sumber informasi sistematis untuk dapat mengukur sejauh mana perkembangan aktivitas ekonomi suatu negara. Suatu data yang akurat diharapkan dapat

menggambarkan suatu kondisi statistik perekonomian. Statistik ini digunakan oleh para ahli ekonomi untuk mempelajari perekonomian dan oleh para pengambil keputusan untuk mengawasi pembangunan ekonomi dan merumuskan kebijakan-kebijakan yang tepat. Dalam konsep dasar ekonomi makro indikator yang digunakan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi, adalah Produk Domestik Bruto (PDB). “Produk Domestik Bruto (PDB) adalah produk nasional yang diwujudkan oleh faktor-faktor produksi di dalam negeri (milik warga negara dan orang asing) dalam suatu negara”.³⁾ Dalam konsep regional Produk Domestik Bruto dikenal sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan indikator ekonomi makro suatu daerah, yang menggambarkan ada atau tidaknya perkembangan perekonomian daerah. Dengan menghitung PDRB secara teliti dan akurat baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai keberhasilan pembangunan di suatu daerah, yang memperlihatkan laju pertumbuhan ekonomi yang mewakili peningkatan produksi di berbagai sektor lapangan usaha yang ada. Berdasarkan rumusan pengertian di atas, maka dalam konsep regional, pertumbuhan ekonomi daerah adalah angka yang ditunjukkan oleh besarnya tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto suatu daerah yang diukur atas dasar harga konstan. Bagi suatu daerah provinsi, kabupaten/kota gambaran PDRB yang mencerminkan adanya laju pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dalam data sektor-sektor ekonomi yang meliputi pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik gas dan air bersih, bangunan, perdagangan hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan persewaan dan jasa perusahaan dan jasa-jasa lainnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari data konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal bruto, perubahan persediaan, ekspor dan impor.

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

³⁾ Sadono Sukirno **Op.Cit**, hal. 17.

“PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi dalam di suatu daerah dalam periode”.⁴⁾PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu wilayah. PDRB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang di hitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRBatas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang di hitungmenggunakan harga pada tahun tertentu. PDRB atas harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran danstruktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Angka-angkaPDRB dapat di hitung dengan tiga pendekatan yaitu :

1. PDRB Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkanoleh berbagai unit produksi barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang berada di suatu wilayah/provinsi dalamperiode tertentu (biasanya satu tahun).Unit-unit tersebut dikelompokan menjadi 9 lapangan usaha yaitu:

- a. Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan,
- b. Pertambangan dan penggalian
- c. Industry pengelolaan
- d. Listrik, gas, dan Air bersih
- e. Konstruksi
- f. Perdagangan, hotel,dan restoran

⁴⁾ Dio Syarullah, **Analisis Pengaruh Produk Domestic Regional Bruto(PDRB), Pendidikan, Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten Tahun 2009-2012**, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Syarif hidayatullah, 2014, hal.11.

- g. Pengangkutan dan komunikasi
- h. Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan,
- i. Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah.

2. PDRB Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendapatan merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu region dalam jangka waktu tertentu yaitu satu tahun. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung dan lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tak langsung neto sedangkan jumlah semua komponen pendapatan ini per sektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu, PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor (lapangan usaha).

3. PDRB Pendekatan Pengeluaran

Salah satu cara/pendekatan untuk mengetahui nilai PDRB dengan melihat sisi pengeluaran. Pos pendapatan nasional membagi GDP menjadi 4 kelompok pengeluaran: a) konsumsi, b) investasi, c) pembelian pemerintah, d) ekspor bersih.

Jadi dengan menggunakan simbol Y untuk GDP menjadi : $Y = (C + I + G + NX)$. Persamaan ini disebut *national income account identity*. Persamaan ini menegaskan bahwa PDRB merupakan total pengeluaran dari konsumsi rumah tangga (C) Investasi (I) pembelian pemerintah (G) dan Ekspor Neto (NX). Konsumsi terdiri dari barang dan jasa yang di beli rumah tangga. Konsumsi di bagi menjadi 3 kelompok yaitu : antara lain barang tidak tahan lama dan barang tahan lama dan jasa (*service*). Konsumsi dalam perekonomian memegang peranan penting dalam pembentukan GDP, karena hampir 70% GDP berasal dari

konsumsi. Investasi terdiri dari barang-barang yang di beli untuk penggunaan masa depan. Investasi juga di bagi 3 kelompok 1) investasi tetap bisnis (*Bussines Fixed Investment*) 2) investasi tetap residensi (*Residential Fixed Investment*) 3) dan investasi persediaan (*Inventory Investment*). Investasi tetap bisnis adalah peralatan dan struktur yang di beli perusahaan untuk penggunaan dalam produksi mendatang. Misalnya pembelian pabrik. Investasi tetap residensi adalah perumahan yang baru yang di beli seseorang untuk ditinggali atau untuk disewakan. Sedangkan investasi persediaan adalah perubahan dalam kuantitas barang yang disimpan perusahaan di gudang termasuk bahan baku dan perlengkapan barang jadi dan barang setengah jadi. Investasi persediaan ini akan meningkatkan persediaan barang perusahaan. Pembelian pemerintah (*government purchases*) adalah barang dan jasa yang di beli oleh pemerintah pusat, negara bagian, dan daerah. Ekspor bersih adalah nilai barang dan jasa yang di ekspor ke negara lain di kurangi nilai barang dan jasa yang di impor dari negara lain yang merupakan cerminan neraca perdagangan suatu negara.

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

“Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.⁵⁾ Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selalu di upayakan karena merupakan penerimaan dari usaha untuk membiayai penyelenggara pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah sumber-sumber pendapatan asli dari daerah, bukan merupakan pemberian bantuan, hibah, penyertaan modal dan sebagainya. PAD

⁵⁾ Republik Indonesia, 2004. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1, No. 18 tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD).**

bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

1) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemda dan pembangunan daerah. Dari sudut pandang kewenangan pemungutan, pajak daerah secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat provinsi (pajak provinsi), dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/Kota.

Berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang menjadi pajak daerah provinsi meliputi:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan
- b. Pajak kendaraan di atas air Bea Milik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PPKB)
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air.

Yang termasuk pajak daerah Kabupaten / Kota meliputi :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan

- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- g. Pajak Parkir

2) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dengan demikian retribusi merupakan pemasukan yang berasal dari usaha Pemda untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat baik individu maupun badan atau korporasi dengan kewajiban memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan ke kas daerah. Retribusi daerah di golongan menjadi tiga yaitu: Jenis retribusi umum dan retribusi perizinan tertentu untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan jenis retribusi jasa usaha untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan jasa pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah yang bersangkutan.

3) Hasil Kekayaan yang Dipisahkan

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya yang sangat penting selain pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian pemerintah daerah atas laba BUMD. BUMD merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat dan merupakan salah satu sumber penerimaan. Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan antara lain seperti bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dapat di upayakan oleh daerah dengan cara-cara yang tidak menyalahi aturan.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah meliputi :

- a) Hasil penjualan daerah yang tidak dipisahkan.
- b) Jasa giro
- c) Pendapatan bunga
- d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- e) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan barang dan/ jasa oleh daerah.

2.2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik. Dana perimbangan dalam UU No.25 Tahun 1999 dan UU No.33/2004 adalah terdiri (a) Dana Bagi Hasil (DBH) (b) Dana Alokasi Umum (DAU) (c) Dana Alokasi Khusus (DAK) Selain itu dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan pusat dan daerah serta untuk mengurangi keseimbangan pendanaan pemerintahan antardaerah. Diperlukan adanya dana perimbangan adalah untuk lebih meratakan daerah antar daerah agar tidak ada satu daerah yang tertinggal dari daerah lainnya, dalam mencapai tujuan bangsa. Dana perimbangan meliputi :

2.2.1. Dana Bagi Hasil(DBH)

“Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang di alokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentasi untuk mendanai kebutuhan daerah dalam

rangka pelaksanaandesentralisasi”.⁶⁾ DBH Bersumber dari Pajak dan Sumber Daya Alam (SDA). Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagi hasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Dari pajak meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPH). Dan dana bagi hasil dari Sumber Daya Alam berasal dari Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi dan Pertambangan Panas Bumi.

Dana Bagi Hasil dari penerimaan Pajak yaitu, PBB, BPHTB, dan PPh sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 11 dibagi antara daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan pemerintahan yaitu:

- 1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah dan 10% (sepuluh persen) bagian pemerintah dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota.
- 2) Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTB adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk daerah dan 20% (dua puluh persen) bagian pemerintah dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota.
- 3) Dana Bagi Hasil dari PPh di bagi dengan imbang 60% (enam puluh persen) untuk kabupaten/kota dan 40% (empat puluh persen) untuk provinsi.

Dana Bagi Hasil yang berasal dari Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Penerimaan Kehutanan sebesar 20% (dua puluh persen) untuk pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah.

⁶⁾ **Ibid**, Pasal 1, No.20, tentang Dana Bagi Hasil (DBH)

- 2) Penerimaan Pertambangan Umum sebesar 20% (dua puluh persen) untuk pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah.
- 3) Penerimaan Perikanan sebesar 20% (dua puluh persen) untuk pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk seluruh kabupaten/kota.
- 4) Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi sebesar 84,5% (delapan puluh empat setengah persen) untuk pemerintah dan 15,5% (lima belas setengah persen) untuk daerah.
- 5) Penerimaan Pertambangan Gas Bumi sebesar 69,5% (enam puluh sembilan setengah persen) untuk pemerintah dan 30,5% (tiga puluh setengah persen) untuk daerah.
- 6) Penerimaan Pertambangan Panas Bumi sebesar 20% (dua puluh persen) untuk pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah.

2.2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Umum (DAU), selanjutnya disebut DAU adalah “dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.⁷⁾ Sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi untuk saat ini masih sangat didominasi oleh bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, sedangkan porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif kecil.

Tentang Dana Perimbangan bahwa tujuan DAU terutama adalah untuk: (a) *Horizontal equity* dan (b) *Sufficiency*. Tujuan *horizontal equity* merupakan kepentingan pemerintah pusat dalam rangka melakukan distribusi pendapatan secara adil dan merata agar tidak terjadi kesenjangan

⁷⁾ **Loc.Cit.**

yang lebar antar daerah. Sementara itu, yang menjadi kepentingan daerah kecukupan (*sufficiency*), terutama adalah untuk menutup *fiscal gap*.

Pada dasarnya terdapat dua jenis *grant* yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yaitu: (1) *Block grant* (Dana Alokasi Umum) dan (2) *Spesific Grant* (Dana Alokasi Khusus). Dalam rangka meningkatkan *local discretion grant*, yang diberikan oleh pemerintah pusat lebih banyak bersifat *block grant* bukan *specific grant*. Proporsi Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi, kabupaten dan kota ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk daerah provinsi sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum (PAD).
- b. Untuk daerah kabupaten dan kota sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum (DAU).

Kebutuhan DAU oleh suatu daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan *fiscal gap*, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah.

2.3. Angkatan Kerja (*Economically Active*)

Angkatan Kerja (*Economically Active*) adalah penduduk dalam usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Selain itu “Angkatan Kerja adalah tenaga kerja yang bekerja dan yang sedang mencari kerja (yang menunggu panggilan bekerja dan yang sedang menganggur)”⁸⁾ Jadi Angkatan Kerja adalah jumlah yang bekerja ditambah jumlah pengangguran dalam kelompok yang sama.

Faktor- faktor yang mempengaruhi Angkatan Kerja (*Economically Active*) meliputi :

1. Jumlah Penduduk Bersekolah dan Mengurus Rumah Tangga

⁸⁾ Elvis F. Purba, Juliana L. Tobing, Dame Eshter Hutabarat, **Op. Cit**, Hal. 57

Hubungan antara Angkatan Kerja dan jumlah penduduk yang masih bersekolah adalah semakin besar jumlah penduduk yang bersekolah, semakin kecil jumlah angkatan kerja yang berarti semakin kecil tingkat angkatan kerja.

b. Tingkat umur

Umur berkaitan dengan Angkatan Kerja, dengan adanya kenyataan bahwa penduduk berumur muda umumnya mempunyai tanggung jawab yang tidak begitu besar sebagai pencari nafkah untuk keluarga dan umumnya mereka bersekolah.

2. Tingkat Upah

Kaitan antara tingkat upah dengan Angkatan Kerja adalah melalui kenyataan bahwa semakin tinggi tingkat upah dalam masyarakat, semakin banyak anggota keluarga yang tertarik masuk pasar kerja.

3. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan berhubungan dengan Angkatan Kerja karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang diharapkan akan semakin tinggi juga tingkat produktivitasnya.

4. Kegiatan Ekonomi

Kegiatan ekonomi berhubungan dengan Angkatan Kerja karena program pembangunan di satu pihak menurut keterlibatan lebih banyak orang, di lain pihak program pembangunan menumbuhkan harapan-harapan baru. Harapan untuk dapat ikut menikmati hasil pembangunan tersebut dinyatakan dalam peningkatan Angkatan kerja. Jadi semakin bertambah kegiatan ekonomi semakin besar Angkatan Kerja.

2.4. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tabel 6. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Laeni Najiah (2003)	Analisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kota Depok.	Variabel Dependen: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Variabel Independen: PAD, DP, dan TPAK.	Secara parsial hanya Dana Perimbangan (DP) yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di kota Depok. Dan secara Simultan menunjukkan bahwa, variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan tingkat partisipasi angkatan kerja secara bersama – sama mampu menjelaskan pengaruh pada PDRB KotaDepok.
Wulan Fauzyny (2013)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi hasil dan Dana Alokasi Umum Terhadap PDRB di Kab/Kota Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2011.	Variabel Dependen: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Variabel Independen: PAD, DBH dan DAU.	PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan PAD yang dianggap sebagai modal dalam prose pertumbuhan ekonomi, DBH berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Tetapi DAU berpengaruh Positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Wiratno Bagus Suryono (2011)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Investasi dan Tenaga Kerja terhadap PDRB Jawa Tengah.	Variabel Variabel Dependen: PDRB Variabel Independen: PAD, Tingkat Investasi, TenagKerja	Hasil analisa data menunjukkan bahwa model penelitian ini lolos uji asumsi klasik dengan <i>R-square</i> model sebesar 0,958. PAD, Tingkat Investasi, Tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan secara parsial maupun Simultan terhadap PDRBJawa tengah.

2.5. Kerangka Konseptual dan Hipotesis

2.5.1 Kerangka Konseptual

Penelitian ini menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Angkatan Kerja (*Economically Active*) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 6 Kota di Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2001 sampai dengan 2015.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari daerah sendiri yang digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah. Semakin tinggi PAD yang diperoleh suatu daerah maka akan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Hal ini bisa terjadi karena dengan penerimaan PAD yang semakin tinggi, daerah semakin bisa memenuhi kebutuhan pembangunan dalam sektor pelayanan kepada publik sehingga produktifitas masyarakat dan investor meningkat yang selanjutnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka Produk Domestik Regional Bruto di pengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) diformulasikan sebagai berikut :

$$Y=f(X1).....(2.1)$$

Dimana Y Produk Domestik Regional Bruto dan X1 adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peranan Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan yaitu Dana Bagi Hasil dalam desentralisasi fiskal akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dan kesejahteraan masyarakat. Karena pemerintah daerah akan lebih efisien dalam memproduksi dan penyediaan barang-barang publik. Menurutnya daerah memiliki kelebihan dalam membuat anggaran pembelanjaan sehingga lebih efisien dengan memuaskan kebutuhan masyarakat karena lebih mengetahui keadaannya.⁹⁾

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari pusat yang merupakan dana perimbangan. Dana Bagi Hasil merupakan penjumlahan dari Dana Bagi

⁹⁾Hadi Sasana, **Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi di kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, Jurnal Ekonomi Pembangunan**, Vol 10 No. Juni, 2009, Hal. 106-107

Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam. Pemerintah daerah akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi apabila Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperoleh pemerintah daerah semakin besar. Dengan mengasumsikan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat pula di pengaruhi oleh Bagi Hasil Pajak, sehingga hubungan Bagi Hasil Pajak terhadap PDRB adalah apabila Bagi Hasil Pajak meningkat maka Produk Domestik Regional akan mengalami peningkatan pula sehingga persamaan (2.1) menjadi:

$$Y=f(X1,X2).....(2.2)$$

Dimana Y adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan X1 Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan X2 Bagi Hasil Pajak.

Sama halnya dengan Bagi Hasil Bukan Pajak bahwa Produk Domestik Regional Bruto dapat pula di pengaruhi oleh bagi Hasil Bukan Pajak. Apabila Bagi Hasil Bukan Pajak meningkat maka Produk Domestik Regional akan mengalami peningkatan pula sehingga persamaan (2.2) menjadi:

$$Y=f(X1,X2,X3).....(2.3)$$

Dimana Y adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), X1 Pendapatan Asli Daerah (PAD), X2 Bagi Hasil Pajak dan X3 Bagi Hasil Bukan Pajak.

Selanjutnya Dana Alokasi Umum (DAU) adalah salah satu mekanisme transfer keuangan Pemerintah Pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang. DAU memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam mengembangkan potensi

daerahnya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat pula di pengaruhi oleh Dana Alokasi Umum (DAU). Apabila Dana Alokasi Umum meningkat maka Produk Domestik Regional akan mengalami peningkatan pula sehingga persamaan (2.3) menjadi:

$$Y=f(X_1,X_2,X_3,X_4)\dots\dots\dots(2.4)$$

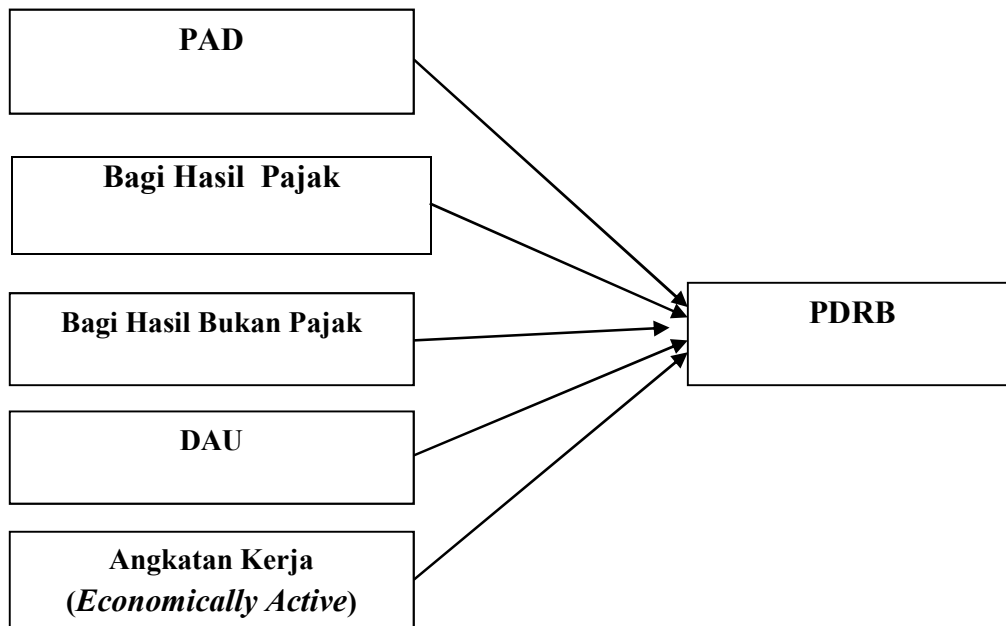
Dimana Y adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan X1 Pendapatan Asli Daerah (PAD), X2 Bagi Hasil Pajak, X3 bagi Hasil Bukan Pajak, dan X4 Dana Alokasi Umum (DAU). Secara umum Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak, bagi Hasil Bukan Pajak, dan Dana Alokasi Umum dapat mendistribusikan pendapatan secara adil dan merata agar tidak terjadi kesenjangan antar daerah.

Sedangkan potensi daerah dari segi sumber daya manusia bisa dilihat dari Angkatan Kerja (*Economically Active*). Menurut teori Solow pertumbuhan ekonomi bergantung kepada kesediaan faktor-faktor produksinya yaitu penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal serta tingkat kemajuan teknologi. Dalam teori Solow tersebut bahwa modal dan Angkatan Kerja memiliki peranan yang cukup penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain Angkatan Kerja adalah salah satu faktor yang mempengaruhi besaran output suatu kegiatan perekonomian, sehingga semakin banyak masyarakat yang produktif maka akan menghasilkan output yang tinggi pula yang dapat mempengaruhi PDRB. Dengan mengamalkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat pula di pengaruhi oleh Angkatan Kerja (AK), sehingga hubungan Angkatan Kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto adalah apabila Angkatan Kerja meningkat maka Produk Domestik Regional Bruto juga akan mengalami peningkatan pula sehingga persamaan (2.4) menjadi:

$$Y=f(X_1,X_2,X_3, X_4,X_5)\dots\dots\dots(2.5)$$

Dimana Y adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan X1 Pendapatan Asli Daerah (PAD), X2 Bagi Hasil Pajak, X3 Bagi Hasil Bukan Pajak, dan X4 Dana Alokasi Umum (DAU) serta X5 Angkatan Kerja (*Economically Active*). Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Berdasarkan kerangka berfikir diatas dan teori serta penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian maka di buat hipotesis sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 6 Kota di Provinsi Sumatera Utara.
- b. Bagi Hasil Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 6 Kota di Provinsi Sumatera Utara.
- c. Bagi Hasil Bukan pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 6 Kota di Provinsi Sumatera Utara.

- d. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 6 Kota di Provinsi Sumatera Utara.
- e. Angkatan Kerja (*Economically Active*) berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 6 Kota di Provinsi Sumatera Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di 6 kota di Provinsi Sumatera Utara (Kota Medan, Binjai, Sibolga, Tebing Tinggi, Tanjung Balai, Pematang Siantar) dengan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Angkatan Kerja (*Economically Active*) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di 6 Kota di Provinsi Sumatera Utara. Sumatera utara pada dasarnya memiliki 8 kota akan tetapi yang saya analisis hanya 6 kota dengan alasan 2 kota baru dimekarkan yaitu Padang Sidempuan tahun pemekaran 2001 dan Gunung Sitolitahun pemekaran 2008 dan data dari kedua kota tersebut belum lengkap.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.1 Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah 6 kota di Sumatera Utara yaitu kota Medan, Binjai, Pematangsiantar, Tanjung Balai, Tebing Tinggi, dan Sibolga dengan tahun penelitian 2001-2015.

3.2.2 Sampel Penelitian

Sampel adalah suatu himpunan bagian (subsek) dari unit populasi. Sampel yang baik pada umumnya memiliki beberapa karakteristik. Karakteristik tersebut ialah:

1. Sampel yang baik memungkinkan peneliti mengambil keputusan yang berhubungan dengan besaran sampel untuk memperoleh jawaban yang dikehendaki.
2. Sampel yang baik mengidentifikasi setiap probabilitas dari setiap unit analisis untuk menjadi sampel.
3. Sampel yang baik memungkinkan peneliti menghitung akurasi dan pengaruh dalam pemilihan sampel dari pada harus melakukan sensus.
4. Sampel yang baik memungkinkan peneliti menghitung derajat kepercayaan yang diterapkan dalam estimasi populasi yang disusun dari sampel statistika.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh dari peneliti atau dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Data yang di gunakan di peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) meliputi:

1. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan untuk kota Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Medan, Binjai di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2001-2015 dalam rupiah.
2. Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rupiah untuk kota Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Medan, Binjai di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2001-2015.

3. Data Bagi Hasil Pajak dalam rupiah untuk kota Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Medan, Binjai di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2001–2015.
4. Data Bagi Hasil Bukan Pajak dalam rupiah untuk kota Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Medan, Binjai di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2001–2015.
5. Data Dana Alokasi Umum (DAU) dalam rupiah untuk kota Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Medan, Binjai di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2001–2015.
6. Data Angkatan kerja (*Economically Active*) dalam jiwa untuk kota Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Medan, Binjai di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2001-2015.

3.4 Metode Analisis

3.4.1 Metode Analisis Data Panel

Untuk mengetahui pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen, studi ini menggunakan analisis data panel sebagai alat pengolahan data dengan menggunakan program SPSS seri 20. Analisis dengan menggunakan data panel adalah kombinasi antara lintas waktu (*time series*) dan lintas individu (*cross section*). Untuk menggambarkan data panel secara singkat, dimana misalkan pada data cross section, nilai dari suatu variabel atau lebih di kumpulkan untuk beberapa unit sampel pada suatu waktu. Dalam data panel, unit cross section yang sama disurvei dalam beberapa waktu. Dalam model data panel, persamaan model menggunakan data lintas individu adalah sebagai berikut:

$$\ln Y_{it} = \ln \beta_0 + \beta_1 \ln X_{1it} + \beta_2 \ln X_{2it} + \beta_3 \ln X_{3it} + \beta_4 \ln X_{4it} + \beta_5 \ln X_{5it}$$

$$i = 1, 2, 3, 4, 5, \dots, N$$

$$t = 1, 2, 3, 4, 5, \dots, T$$

Dimana :

Y = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam Milyar Rupiah

X_1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Ribu Rupiah

X_2 = Bagi Hasil Pajak dalam Ribu Rupiah

X_3 = Bagi Hasil Bukan Pajak dalam Ribu Rupiah

X_4 = Dana Alokasi Umum (DAU) dalam Ribu Rupiah

X_5 = Angkatan Kerja (*Economically Active*) dalam Jiwa

N = banyaknya observasi

T = banyaknya waktu

$N \times T$ = banyaknya data panel

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ = Koefisien penjelas masing-masing input nilai parameter

u = *Error term*

Pada penelitian ini peneliti menggunakan *data time series* pada tahun 2001-2015 dan data *cross section* 6 kota di Sumatera Utara yaitu kota Medan, Binjai, Pematangsiantar, Tanjung Balai, Tebing Tinggi dan Sibolga 6 Kota di Provinsi Sumatera Utara.

Keunggulan penggunaan data panel dibandingkan lintas waktu dan lintas individu adalah :

- a. Dapat memberikan peneliti jumlah penggunaan yang besar, meningkatkan *degrees of freedom* (derajat kebebasan), dan memiliki variabilitas yang besar dan mengurangi kolineritas antara variabel penjelas, dimana dapat menghasilkan ekonometri yang efisien.
- b. Dengan data panel, data lebih informatif, lebih bervariasi yang tidak dapat diberikan hanya oleh data *cross section* atau *time series* saja

- c. Data panel dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam inferensi perubahan dinamis dibandingkan data *cross section*.

3.4.2 Fixed Effect Model (FEM)

Dalam analisis model data panel dikenal, dua macam pendekatan yang terdiri dari pendekatan model efek tetap (*fixed effect model*), dan pendekatan model efek acak (*random effect model*). Salah satu kesulitan data panel adalah asumsi bahwa intersep dan slope yang konsisten sulit terpenuhi. Untuk menghasilkan hal tersebut, yang dilakukan data panel adalah dengan memasukkan variabel boneka (*dummy variable*) untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai parameter yang berbeda-beda baik antar waktu (*time series*) maupun lintas waktu (*cross section*). Pendekatan dengan memasukkan variabel boneka ini dikenal dengan sebuah Model Efek Tetap (*fixed effect model*) atau *Least Square Dummy Variable (LSDV)*.

Permodelan *Fixed Effect Model* memiliki beberapa kelemahan yaitu:

- a. Masalah kekurangan derajat kebebasan (*degree of freedom*) akibat jumlah sampel yang terbatas. Sebagai contoh jika data yang dimiliki terdiri atas 10 unit *cross section* dan 5 unit *time series*, maka kita harus mengestimasi 13 variabel dummy tambahan. Rendahnya derajat kebebasan dapat menimbulkan inefisiensi pada parameter yang diestimasi.
- b. Multikolinearitas yang diakibatkan oleh banyaknya variabel dummy yang diestimasi.
- c. Keterbatasan kemampuan estimasi, terutama jika terdapat variabel yang bersifat tidak berubah berdasarkan waktu (*time invariant*).
- d. Kemungkinan korelasi di antara komponen residual spesifik (*cross section* dan *time series*).

3.4.3 Model Efek Acak (Random Effect Model)

Keputusan untuk memasukkan variabel boneka dalam model efek tetap (*fixed effect*) tak dapat dipungkiri akan dapat menimbulkan konsekuensi (*trade off*). Penambahan variabel boneka

ini akan mengurangi banyaknya derajat kebebasan (*degrees of freedom*) yang pada akhirnya akan mengurangi efisiensi dari parameter yang diestimasi. Model data panel yang didalamnya melibatkan korelasi antar *error term* karena berubahnya waktu karena berbedanya observasi dapat diatasi dengan pendekatan model komponen error (*error component model*) atau disebut juga model efek acak (*fixed effect*).

Dalam hal ini, pendekatan pada estimasi *Random Effect Model* menggunakan variabel gangguan atau *error term* sebagai penghubung antara objek dan waktu. Ada empat pertimbangan pokok untuk memilih antara menggunakan pendekatan efek tetap (*fixed effect*), dan pendekatan efek acak (*random effect*) dalam data panel :

1. Jika jumlah *time series* (T) besar dan jumlah *cross-section* (N) kecil maka taksiran para meter berbeda kecil, sehingga pilihan didasarkan pada kekemudahan perhitungan, yaitu FEM.
2. Bila N besar dan T kecil penaksiran FEM dan REM menghasilkan perbedaan yang signifikan. Pada REM diketahui bahwa $\beta_{0i} = \beta_0 + \varepsilon_i$ dimana ε_i adalah komponen acak *cross-section* dalam FEM diperlukan β_0 adalah tetap tidak acak. Bila diyakini bahwa individu atau *cross-section* tidak acak maka FEM tetap.
3. Jika komponen *error* ε_i individu berkorelasi maka penaksiran REM adalah bias dan penaksiran FEM tidak bias
4. Jika N besar dan T kecil serta asumsi REM dipenuhi maka penaksiran REM lebih efisien dari penaksiran FEM.¹⁰⁾

3.5 Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel

3.5.1. Uji Chow

Uji ini digunakan untuk memilih salah satu model pada regresi data panel, yaitu antara Model Efek Tetap (*Fixed Effect Model*) dengan model koefisien tetap (*common effect*) dimana:

Ho: Model *Common Effects* lebih baik daripada *Fixed Effects*

H₁ : Model *Fixed Effects* lebih baik daripada *Common Effects* statistik yang digunakan merupakan uji F, yaitu :

¹⁰⁾ Jonni J. Manurung, dkk, *Ekonometrika Teori dan Aplikasi*, Cetakan Pertama, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005, hal. 220

$$F = \frac{(R^2_{\text{new}} - R^2_{\text{old}}) / df}{(1 - R^2_{\text{new}}) / df} = \frac{(R^2_{\text{new}} - R^2_{\text{old}}) / m}{(1 - R^2_{\text{new}}) / n - k}$$

Dimana :

m = banyaknya peubah bebas (regresor yang baru)

k = jumlah parameter dalam model yang baru

n = jumlah pengamatan

keputusan: jika nilai F berada pada nilai α maka terima H_0 yaitu berarti model *FEM* adalah model yang terbaik.

3.5.2. Estimasi Model

Dalam penelitian ini, pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Angkatan Kerja (*Economically Active*) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) digunakan asumsi FEM yang pertama yaitu koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi antar individu dikarenakan “Jika N besar dan T kecil serta asumsi REM dipenuhi maka penaksiran REM lebih efisien dari penaksiran REM”.¹¹⁾ Asumsi FEM yang digunakan dalam penelitian ini adalah asumsi FEM yang pertama, yaitu koefisien slope konstan tetapi intersep tidak bervariasi antar individu. bentuk model fixed effect adalah dengan memasukkan variabel *dummy* untuk menyatakan perbedaan intersep. Ketika variabel *dummy* digunakan untuk mengestimasi *fixed* model, maka persamaan tersebut di sebut sebagai *least square dummy variable (LSDV)*. Model fungsi yang akan digunakan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Angkatan Kerja (*Economically Active*) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu:

Model sederhananya adalah sebagai berikut:

¹¹⁾ Loc.Cit

$$\ln Y_{it} = \ln \beta_{0i} + \beta_1 \ln X_{1it} + \beta_2 \ln X_{2it} + \beta_3 \ln X_{3it} + \beta_4 \ln X_{4it} + \beta_5 \ln X_{5it} + u_{it}$$

$$Y = f(X_1, D_2, D_3, D_4, \dots, D_{15})$$

Jika dilihat dari Lintas Waktu :

$$\ln Y_{it} = \alpha_0 + \alpha_2 D_{2002} + \alpha_3 D_{2003} + \alpha_4 D_{2004} + \alpha_5 D_{2005} + \dots + \alpha_{15} D_{2015} + \beta_1 \ln X_{1it} + \beta_2 \ln X_{2it} + \beta_3 \ln X_{3it} + \beta_4 \ln X_{4it} + \beta_5 \ln X_{5it} + u_{it}$$

Sedangkan ,jika dilihat dari lintas individu :

$$\ln Y_{it} = \alpha_0 + \alpha_2 D_{2i} + \alpha_3 D_{3i} + \alpha_4 D_{4i} + \alpha_5 D_{5i} + \alpha_6 D_{6i} + \beta_1 \ln X_{1it} + \beta_2 \ln X_{2it} + \beta_3 \ln X_{3it} + \beta_4 \ln X_{4it} + \beta_5 \ln X_{5it} + u_{it}$$

Dimana :

Y= Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)dala milyar Rupiah

X₁ = Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Ribu Rupiah

X₂= Bagi Hasil Pajak dalam Ribu Rupiah

X₃=Bagi Hasil Bukan Pajak dalam Ribu Rupiah

X₄= Dana Alokasi Umum (DAU) dalam Ribu Rupiah

X₅ = Angkatan Kerja (*Economically Aktive*) dalam Jiwa

i = Unit *cross section*

t = Unit *time series*.

α = konstanta

β = koefisien.

u = *error term*

D = *dummy*

3.6. Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik

Suatu model dikatakan baik untuk alat prediksi apabila mempunyai sifat-sifat tidak bias linier terbaik suatu penaksir. Disamping itu suatu model dikatakan cukup apabila sudah lolos dari serangkaian uji asumsi klasik yang melandasinya. Uji asumsi klasik terdiri dari :

3.6.1 Deteksi Normalitas

Uji kenormalan bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi bahwa galat (residu res_1) memiliki sebaran normal atau tidak. Seperti diketahui bahwa dalam uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai galat mengikuti sebaran normal. Jika asumsi ini tidak terpenuhi maka uji statistik menjadi tidak sah untuk ukuran sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah galat menyebar normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik.

a. Analisis Grafik

Metode yang lebih handal adalah dengan melihat grafik peluang normal yang membandingkan sebaran kumulatif dari sebaran normal. Sebaran normal akan membentuk suatu garis lurus diagonal dan grafik data galat res_1 akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika sebaran data galat normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

b. Analisis Statistik

Uji statistik yang dapat digunakan menguji kenormalan adalah uji statistika nonparameter, yaitu Uji Kolmogorov-Smirnov. Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis sebagai berikut :

H_0 : Data galat menyebar normal , H_1 : Data galat tidak menyebar normal

3.6.2 Deteksi Multikolinearitas

Multikolinearitas artinya terdapat korelasi yang signifikan di antara dua atau lebih variabel bebas dalam suatu model regresi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model persamaan penelitian ini, penulis menggunakan matriks korelasi (*Correlation Matrix*). Indikasi awal adanya masalah multikolinearitas dalam model adalah mempunyai *standard error* besar dan nilai statistik t yang rendah. Penyembuhan multikolinearitas ada dua, yaitu memperbaiki model supaya terbebas dari multikolinearitas atau membiarkan model mengandung multikolinearitas. Jika kita tetap membiarkan model kita terdapat multikolinearitas, maka hal tersebut akan menyulitkan kita untuk memperoleh estimator dengan standar error yang kecil. Masalah multikolinearitas timbul karena kita hanya mempunyai jumlah observasi yang sedikit. Cara menghilangkan multikolinearitas yaitu dengan cara menghilangkan salah satu variabel independen yang mempunyai hubungan linear kuat, mentransformasi variabel dan menambahkan jumlah data. Apabila pengujian multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan *correlation matrix*, jika hasilnya ada yang melebihi dari 0,8, itu menandakan bahwa terjadi multikolinearitas yang serius. Jika terjadi multikolinearitas yang serius, maka akan berakibat buruk, karena hal tersebut akan mengakibatkan pada kesalahan standar estimator yang besar.

3.6.3 Deteksi Autokorelasi

Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam data deretan waktu) atau ruang (seperti dalam data cross-sectional). Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode waktu atau ruang dengan

kesalahan pengganggu pada waktu atau ruang (sebelumnya). Pengujian menggunakan *Uji Durbin-Watson* untuk melihat gejala autokorelasi.

3.6.4. Deteksi Heteroskedastisitas

Deteksi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas terjadi apabila variabel gangguan tidak mempunyai varian yang sama untuk semua observasi. Akibat adanya heteroskedastisitas, penaksir OLS tidak bias tetapi tidak efisien. Cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan *white heteroscedasticity standard errors and covariance* yang tersedia dalam program SPSS. Uji ini diterapkan pada hasil regresi yang menggunakan prosedur equation dan metode *OLS* untuk masing-masing perilaku dalam persamaan simultan. Hasil yang perlu diperhatikan dalam uji ini adalah nilai F dan *Obs*Squared*, secara khusus adalah nilai probability dari *Obs*Squared*. Dengan uji *White* dibandingkan *Obs*Squared* dengan C^2 (*chisquared*) tabel. Jika nilai *Obs*R-Squared* lebih kecil dari nilai C^2 tabel maka tidak ada heteroskedastisitas pada model.

3.7. Pengujian Kriteria Statistik

Uji signifikan merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kesalahan dari hipotesis nol dari sampel. Ide dasar yang melatar belakangi pengujian signifikan adalah uji statistik (estimator) dari distribusi sampel dari suatu statistik di bawah hipotesis nol. Keputusan untuk mengolah H_0 di buat berdasarkan nilai statistik yang diperoleh dari data yang ada.

Uji statistik terdiri dari pengujian koefisien regresi parsial (Uji-t) pengujian koefisien regresi secara bersama sama (Uji-F) dan pengujian determinasi *Goodness of fit tes* (R^2).

3.7.1 Uji t-statistik (Uji Parsial)

Uji t-statistik merupakan satuan pengujian parsial yang bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing koefisien regresi signifikan atau tidak terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lainnya konstan dalam hal ini digunakan hipotesis sebagai berikut:

$H_0 : \beta_{it} = 0$(tidak ada pengaruh)

$H_1 : \beta_{it} \neq 0$(ada pengaruh)

Dimana bila ada koefisien variabel independen ke-it para meter hipotesis, biasanya β dianggap nol artinya tidak ada pengaruh variabel X terhadap Y. Bila t-hitung > t-tabel, maka tingkat kepercayaan tertentu H_0 ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel independen yang di uji berpengaruh secara nyata(signifikan) terhadap variabel dependen. Dan bila t-hitung < t-tabel maka pada tingkat kepercayaan tertentu H_0 diterima. Ini artinya bahwa variabel independen yang di uji tidak berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara keseluruhan signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel dependen. Apabila nilai F Tabel > F hitung maka variabel-variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen. Pada tingkat signifikansi 5% dengan kriteria pengujian digunakan sebagai berikut :

1. H_0 diterima dan H_1 ditolak apabila $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, yang artinya variabel secara serentak atau bersama-sama tidak mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.
2. H_0 ditolak dan H_1 diterima apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, yang artinya variabel penjelas secara serentak dan bersama sama mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.

3.7.2 Uji F-statistik

Uji F ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen secara keseluruhan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk pengujian ini digunakan hipotesis sebagai berikut:

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$ (tidak ada pengaruh)

H1 : $\beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$(ada pengaruh)

Pengujian ini digunakan untuk membandingkan F-hitung dengan F-tabel. Jika F-hitung > F-tabel, maka Ho di tolak artinya variabel independen secara keseluruhan mempengaruhi variabel dependen dan jika F-hitung < F-tabel maka Ho diterima, artinya variabel dependen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen. Nilai F-hitung dapat diperoleh dengan rumus :

$$F - hitung = \frac{R^2 / k - 1}{1 - R^2 / (n - k)}$$

Dimana :

R^2 : koefisien determinasi

k : jumlah variabel independen

n : jumlah sampel

kriteria pengambilan keputusan:

Ho: $\beta_1 = \beta_2 = 0$, Ho diterima (F-hitung < F-tabel) artinya variabel independen secara simultan berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.

Ha : $\beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$, H1 diterima (F-hitung > F-tabel) artinya variabel independen secara simultan berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.

3.8. Koefisien Determinasi R^2

Menyatakan bahwa koefisien determinasi R^2 pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai R^2 adalah antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil (mendekati 0) berarti kemampuan variabel-variabel dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Kelemahan mendasar penggunaan determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel pasti meningkat tidak peduli

apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggambarkan nilai *adjustedR²* pada saat mengevaluasi model regresi yang terbaik.

3.9. Definisi Variabel Operasional

1. Variabel Dependen

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah bruto barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu (satu tahun). PDRB yang dimaksud adalah laju PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2001–2015 dengan menggunakan satuan dalam rupiah.

2. Variabel Independen

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan antar pusat dan daerah “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. PAD adalah penerimaan yang berasal dari sumber pendapatan daerah yang terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah, dan penerimaan PAD lain-lain. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah PAD Tahun 2001–2015 dengan menggunakan satuan dalam milyar rupiah.

b. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil ini bersumber dari pajak dan kekayaan daerah. Dimana menurut pasal 11 ayat 1 UU No. 33 tahun 2004. DBHPajak berasal dari penerimaan

pajak bumi dan bangunan, penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, bagi hasil pajak penghasilan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain-lain. DBH Bukan Pajak berasal dari sumber daya alam, pengelolaan kekayaan negara yang telah di pisahkan, penerimaan dan pemasukkan dari kegiatan pelayanan, penerimaan dan pemasukkan yang di dasarkan atas keputusan pengadilan, dan penerimaan dana berupa hibah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah DBH Tahun 2001–2015 dengan menggunakan satuan dalam rupiah.

c. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang di maksud untuk menutupi kesenjangan fiskal (*fiskal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat. Dalam UU No. 33 tahun 2004, DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah DAU Tahun 2001–2015 dengan menggunakan satuan dalam rupiah.

d. Angkatan Kerja (*Economically Active*)

Angkatan Kerja (*Economically Active*) adalah penduduk dalam usia kerja (15 ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Bekerja (*Working*) adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tumpah upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Angkatan Kerja (*Bekerja/Working*) Tahun 2001–2015 menggunakan satuan dalam ribu rupiah.